

**ANALISIS TERHADAP HAMBATAN-HAMBATAN
DEWAN PENGAWAS SYARI'AH
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI KABUPATEN
PONOROGO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat–Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Pada Fakultas Agama Islam
Program Studi Muamalat (Syari'ah)**

Oleh :

YENI WAHYUNINGSIH

NIM : I000070027

**JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu yang memberikan panduan yang dinamis dan tegas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan keuangan atau ekonomi. Dalam dunia modern sekarang ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sektor jasa keuangan pada umumnya dan khususnya sektor perbankan. Melalui sektor perbankan ini dana atau potensi keuangan yang tersedia dialokasikan pada aktivitas-aktivitas yang produktif dan menguntungkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan baik.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal industri BPR syari'ah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syari'ah. Karena kesesuaian operasi dan praktek BPR syari'ah dengan syariah merupakan piranti mendasar dalam lembaga keuangan syari'ah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah wajib memiliki institusi internal yang independen.

Pertumbuhan yang signifikan ini mengandung konsekuensi tersendiri yang berupa meningkatnya persaingan bisnis Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Bisnis Syariah. Untuk menghindari persaingan tidak sehat yang mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip

syari'ah, perlu ditingkatkan aspek pengawasan syari'ah. Perbedaan mendasar Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Konvensional terletak pada kepatuhannya terhadap aturan syari'ah. Dengan begitu, peran Dewan Pengawas Syari'ah menjadi sangat penting karena akan menentukan kesyariahan Lembaga Keuangan Syari'ah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan peraturan Bank Indonesia.

Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perbankan No 10/1998 yang menyebutkan bahwa bank syari'ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah. (www.mui.or.id)

Peranan Dewan Pengawas Syari'ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syari'ah di lembaga perbankan syari'ah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syari'ah Nasional MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa Dewan Syari'ah Nasional memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syari'ah

- 1 Untuk melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah.

- 2 Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional
- 3 Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4 Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syari'ah Nasional (Ismanto, 2009:116-117)

Menurut Azfanluthfi dalam blognya mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai peran yang penting bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Ada tiga alasan Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai peran penting dalam lembaga perbankan syari'ah antara lain :

1. Menentukan tingkat kredibilitas bank syari'ah.
2. Menciptakan jaminan kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance assurance*).
3. Salah satu pilar yang paling utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syari'ah. (azfanluthfi.blogspot.com)

Adapun menurut Agustianto MA, seorang pengamat ekonomi dalam blognya mengatakan bahwa fenomena yang terjadi saat ini didalam praktek pengawasan syari'ah dilembaga BPR syari'ah adalah peran vital Dewan Pengawas Syari'ah belum berjalan secara optimal, untuk melakukan pengawasan tersebut anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral yaitu ilmu fiqih muamalah dan ilmu keuangan Islam modern. (agustianto.niriah.com)

Masyarakat di sekitar daerah Ponorogo mayoritas penduduknya beragama Islam. Didukung berdirinya pondok-pondok pesantren di wilayah Kabupaten Ponorogo, membuat citra Kabupaten Ponorogo sebagai masyarakat Islam tidaklah diragukan. Namun, seiring dengan permasalahan umat yang kian kompleks membuat para cendekiawan muslim berfikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu masalah yang mungkin dianggap mudah oleh kebanyakan orang adalah masalah muamalah yang berkaitan dengan perbankan. Saat ini lembaga keuangan syari'ah di Kabupaten Ponorogo sudah banyak didirikan antara lain BPRS Al-Mabrur, BMT "Surya Mandiri", BMT "Bina Insan", BMT "Laa Tansa", BMT "Isra" dan Bank Muamalah.

Berdasarkan wawancara awal saya dengan salah satu karyawan di lembaga keuangan syari'ah mengenai hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syari'ah saya mendapatkan informasi bahwa hambatan dari Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan Pengawas Syari'ah belum mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk Bank Syari'ah padahal kapasitas DPS sebagai Pimpinan Pesantren yang dianggap mampu memberikan penjelasan kepada umat Islam khususnya untuk menggunakan bank syari'ah, selain itu menurutnya peran vital Dewan Pengawas Syari'ah belum berjalan optimal. Dari hasil wawancara tersebut saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang hambatan hambatan Dewan Pengawas Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk mencari perbandingan antara

Dewan Pengawas Syariah satu dengan Dewan Pengawas Syariah yang lain dan solusi apa yang telah diupayakan oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

Melihat latar belakang tersebut, penyusun merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai Analisis Terhadap Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Ponorogo.

B. Penegasan Istilah

1. Analisis : Analisa, penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab, musabab dan akibat perkaranya. (Suharso, Ana Retnoningsih, 2005: 37).
2. Hambatan : Halangan atau rintangan dalam menghadapi sesuatu. (Suharso, Ana Retnoningsih, 2005: 163)
3. DPS (Dewan Pengawas Syariah) : Dewan Pengawas Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Peran ini dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah. dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN. (Antonio, 2001: 31)
4. Lembaga Keuangan Syariah : lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan memberikan pembiayaan dan jasa-

jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. (Yuliadi, 2001: 127)

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

- a. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Ponorogo?
- b. Solusi apa saja yang telah diupayakan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan Pengawas Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Ponorogo serta solusi apa saja yang telah diupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu Ekonomi Islam pada khususnya mengenai hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syari'ah dalam

menjalankan tugas pengawasannya di Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Ponorogo

2. Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman pada pihak-pihak yang terkait mengenai hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syari'ah dalam pengawasan kesyariahan di Lembaga Keuangan Syari'ah dan permasalahan serta solusi dalam hambatan-hambatan tersebut.

F. Kajian pustaka

Pembahasan tentang hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syari'ah masih sangat minim. Adapun masalah yang perlu berusaha dicarikan jawabannya tidak dibahas secara mendetail. Karena itu penulis berusaha menelaah beberapa penelitian yang cukup relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Menurut Agustianto. MA Sekjen Ekonomi Islam di Indonesia dalam blognya yang mengupas tentang "*Optimalisasi Dewan Pengawas Syari'ah*" menyatakan bahwa di dalam praktek pengawasan syari'ah di bank-bank syari'ah di Indonesia adalah peran vital Dewan Pengawas Syari'ah belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Fenomena ini tidak saja di lembaga BPR Syari'ah tetapi juga di bank umum syari'ah. melihat para ulama dan

ustadz yang secara tertulis dicantumkan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Bank Syari'ah, tetapi fungsinya jauh dari optimal. Banyak di antara mereka yang tidak berperan sama sekali mengawasi operasional perbankan syari'ah. (agustianto.niriah.com)

Menurut Suwarno dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis hambatan dalam penerapan akuntansi syari'ah pada bank syari'ah studi kasus pada bank syari'ah"* adalah : Penerapan akuntansi syari'ah pada lembaga perbankan syari'ah saat ini masih menghadapi kendala-kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah minimnya sumber daya manusia yang ahli akuntansi syari'ah dan faktor eksternalnya adalah sistem pengawasan dari Dewan Pengawas yang belum optimal. (www.adln.lib.unair.ac.id)

Sedangkan menurut Anik Arofah dalam penelitiannya yang berjudul *"Peran Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Pengawasan Aspek Syari'ah"* (studi kasus Batul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten)". Hambatan yang dialami dewan pengawas syari'ah adalah keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syari'ah dan juga pengelola mengenai fiqih muamalah dalam transaksi ekonomi modern. (www.digilib.uns.ac.id).

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, kiranya dapat dijelaskan bahwa hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syari'ah dalam menjalankan tugas pengawasannya adalah peran vital DPS belum berjalan optimal seperti: secara personal DPS tidak bisa hadir setiap hari karena kesibukan

pribadi atau kesibukan yang lain, kurangnya sumber daya manusia yang memadai seperti: kurangnya DPS yang memahami akuntansi syari'ah, dan operasional perbankan, serta kurangnya pemahaman tentang fiqh muamalah serta ekonomi modern.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah . dengan mengamati dan menelaah apa yang terjadi di lapangan pada objek penelitian, sehingga dengan demikian penelitian yang akan dilakukan hanya difokuskan pada permasalahan tersebut dan dikhususkan pada analisis hambatan hambatan dewan pengawas syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah Kabupaten Ponorogo (Moleong, 2007: 26).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif. Eksploratif adalah penelitian yang tujuan utamanya memberikan gagasan, wawasan, pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi oleh peneliti (Muhamad, 2005 : 50). Muhamad menambahkan bahwa penelitian ini sangat fleksibel,

dimana adanya kemudahan perubahan suatu saat setiap ditemukan gagasan atau wawasan baru.

Jenis penelitian Eksploratif digunakan untuk menggali atau mengidentifikasi hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan kesyariahan dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dan permasalahannya serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merujuk sekumpulan orang yang memiliki kesamaan pokok dalam penelitian (Muhamad, 2005:97). Jadi dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Ponorogo. “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 55). Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Ponorogo diantaranya BPR Syariah Al-mabrur, BMT “Surya

Mandiri”, BMT “Bina Insan”, BMT “Laa Tansa”, BMT “Isra” dan Bank Muamalah.

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci (Muhamad, 2005 : 97). Sampel dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah Dewan Pengawas Syari’ah di Lembaga Keuangan Syari’ah di Kabupaten Ponorogo sebanyak tiga Lembaga Keuangan Syari’ah antara lain: BPR Syariah Al- mabrur, BMT Surya Mandiri dan BMT Bina Insan Alasannya dari ketiga Lembaga Keuangan Syari’ah ini saja yang mendapatkan izin riset dan layak diteliti sedangkan yang lain baru berdiri dan belum bisa untuk diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena penelitian yang dapat menghasilkan suatu pemahaman dengan kesimpulan yang tepat. Sumber data juga sangat penting dalam menentukan ketepatan ilmiah dan penentuan jenis sumber data yang sesuai akan menentukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu hambatan-hambatan Dewan

Pengawas Syari'ah dalam menjalankan tugas pengawasan kesyariahan di Lembaga Keuangan Syari'ah. Adapun data penelitian ini diperoleh dari Dewan Pengawas Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Ponorogo.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan kepustakaan dari buku, dokumen, laporan, literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan yang dikerjakan sebagai suatu proses untuk mengadakan penjajakan tentang perilaku manusia atau kelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan.

b. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan yang objeknya adalah/ literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Metode Interview (wawancara)

Proses tanya jawab, lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lainnya dapat mendengar dengan telinga sendiri (Hadi, 1987: 192)

4. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan usaha mengolah data yang terkumpul sehingga menjadi terarah terwujud hasil laporan penelitian yang ilmiah. Data disajikan lebih ringkas sehingga akan mempermudah bagi peneliti dalam memberikan jawaban masalah yang akan dirumuskan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Moleong, 2007 : 248).

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Adapun sistematika skripsi ini antara lain:

BAB I : Pendahuluan, Berisi tentang: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka , metodologi penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Dewan Pengawas Syari'ah, Berisi tentang: Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah, kedudukan/

struktur Dewan Pengawas Syari'ah, tugas dan kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah, peran Dewan Pengawas Syari'ah, teori tentang pengawasan, peran ilmuwan pakar tentang Dewan Pengawas Syari'ah.

BAB III : Profil Dewan Pengawas Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Ponorogo, Berisi tentang: Lembaga Keuangan Syari'ah, sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, produk-produk, struktur organisasi Dewan Pengawas Syari'ah, Proses Pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah, Tugas Dewan Pengawas Syari'ah, kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah, wewenang Dewan Pengawas Syari'ah, laporan kegiatan Dewan Pengawas Syari'ah atas perkembangan lembaga keuangan syari'ah, hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syari'ah dan solusinya.

BAB IV : Analisa Terhadap Hambatan-Hambatan Dewan Pengawas Syari'ah

BAB V : Penutup, Berisi tentang Kesimpulan Dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

